

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004, tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.
- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 23.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi. Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

Buku

- Adjie, Habib dan Muhammad Habib, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Yayasan*, Pustaka Zaman: Semarang, 2013.
- Ali, Chidir, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, 1991.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ashidiqqie, Jimly dan Ali Safa,at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
- Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas*, Malang: Setara Press, 2016.
- Chataramassjid, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2000.
- Chataramassjid, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selektta Hukum Perusahaan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Devita, Irma, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Mendirikan Badan Usaha, Cet. 1*, Bandung: Kaifa, 2010.

- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hariyani, Iswi. R. Serfianto Dibyo Purnomo dan Cita Yustisia Serfiyani, *Panduan Praktis SABH Sistem Administrasi Badan Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
- Haniatjo, Ronny Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990.
- Kie, Tan Thong, *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris, Buku I*, Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 2000.
- Prasetya, Rudhi, *Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris dalam Perseroan Terbatas*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2005.
- Prasetya, Rudhi, *Yayasan dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005.
- Mulhadi, *Hukum Perusahaan : Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Bandung: Jemmars, 1982.
- S., Salim H, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum (Cetakan Ke-3)*, Jakarta: UI Press, 2015.
- Subekti dan Mulyoto, *Yayasan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Yayasan dan PP. No. 63 Tahun 2008*, Yogyakarta: Cakrawala Media, 2011.
- Sumardjono, Maria SW, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2019.
- Surya, Indra dan Ivan Yustiviandana, *Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Untung, Budi *et.al.*, *Reformasi Yayasan, Persepektif Hukum dan Manajemen*, Yogyakarta: Andi, 2002.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Jurnal

- Chrystofer, “Implikasi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Terhadap Peran Notaris dalam Melaporkan Informasi Pemilik Manfaat di DKI Jakarta”, *Tesis*, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2019.
- Annisa Dian Hardiyanti, “Implikasi Hukum Penerapan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dalam Pendirian Yayasan Ditinjau dari Undang-Undang tentang Yayasan”, *Tesis*, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2020.
- Burhan Jatmiko Paramita Prananingtyas, Kajian Yuridis Ketentuan Mengenai Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) Perseroan, *Jurnal Notarius*, Volume 16 Nomor 1, 2023.

Nyulistiowati Suryanti, Notaris Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian *Nominee*, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Volume 4 Nomor 1, 2020.

Internet

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia, <https://ahu.go.id/>.

Komite Nasional Kebijakan Governance,
https://www.ecgi.global/sites/default/files/codes/documents/indonesia_cg_2006_id.pdf.